

KONSEP ISLAM DAN NEGARA MENURUT KH. ACHMAD SIDDIQ

Mustofa

Gubeng Klingsingan 2/26 Surabaya | mustofa_sj@yahoo.com

Abstract: This article discusses the thought of KH. Achmad Siddiq (d. 1991) on the relationship between Islam and the state. He was the spiritual leader of Nahdlatul Ulama from 1984 to 1991. He articulated Islam and Indonesia by actualizing the thought of Sunni Islam. He concludes that Islam and the state mutually beneficial. He (1) argues that Pancasila, the state philosophy, contains the principle of monotheism and humanism; (2) constructs pluralistic concept with trilogy of brotherhood, namely islamic brotherhood, national brotherhood, and humanistic brotherhood; (3) creates islam as rahmah li al-‘ālamīn (blessing for the worlds) and maintains the finality of unitary republic of Indonesia. he asserts that Islam and the state is mutually correlated, islam regulates norms and ethic whereas the state is responsible to actualizes those norms and ethic in form of regulatory framework. Thus, religion and the state fortifies each other's function.

Keywords: Islamic political thought, KH. Achmad Siddiq, Nahdlatul Ulama

Abtrak: Artikel ini membahas tentang pemikiran KH. Achmad Siddiq tentang Islam dan negara. KH. Achmad Siddiq berusaha mengaktualisasikan Islam dan keindonesiaan dalam format ajaran *ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah* dalam bentuk simbiosis mutualistik berupa: 1) Memaknai Pancasila dengan konsep tauhid yang berbasis humanis, 2) Membangun konsep pluralistik dengan konsep trilogi *ukhuwwahnya*, yaitu; *ukhuwwah Islâmiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, dan *ukhuwwah basyariyyah*, 3) Mewujudkan Islam *rahmah li al-‘ālamīn* dengan bingkai negara Indonesia berbentuk NKRI yang final dalam usaha merealisasikan *mashlahah ‘āmmah*. Menurut K.H. Achmad Siddiq, negara dan agama sejatinya ada korelasinya, agama mengatur nilai-nilai kehidupan, di mana agama berperan dalam membentuk nilai-nilai etik, sedangkan negara bertugas mengaktualisasikan nilai-nilai

etik dan moral dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Agama dan negara saling menguatkan fungsi masing-masing.

Kata Kunci: Islam, negara, KH. Achmad Siddiq.

Pendahuluan

Agama Islam, dalam mengajak manusia untuk beriman dalam mengamalkan akidahnya dan mempercayai ajarannya, tidaklah hendak mempergunakan jalan kekerasan dan paksaan, karena sifat keimanan itu sendiri bertentangan dengan kekerasan dan paksaan, dalam bentuk manapun. Sebenarnya keimanan itu hendaklah tumbuh dengan wajar dalam jiwa.¹

Pengertian agama dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata *dîn* dari bahasa Arab dan kata *religi* dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Selanjutnya, *dîn* dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan.²

Islam adalah ajaran pembebasan manusia dari segala belenggu yang mengungkung dirinya hingga menjadi manusia merdeka. Islam adalah *tahrîr al-nâs min 'ibâdah al-'ibâd ilâ ibâdah Allah*: membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia dengan hanya menyembah Allah saja.³

Pengertian Islam secara istilah atau secara khusus adalah Islam merupakan agama yang diterima nabi Muhammad saw melalui wahyu yang pertama kali diterima di gua Hira,⁴ yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui nabi Muhammad saw, sebagai rasul.⁵ Makna Islam demikian itu memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan

¹ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 7.

² Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1985), 9.

³ Abdul Raup Silahudin, *Membela Islam*, (Bandung: MQ Publishing, 2006), 64.

⁴ *Ibid.*, 139.

⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 24.

orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri. Kata Islam adalah agama yang diberikan oleh Tuhan sendiri.⁶

Secara literal, negara merupakan terjemahan dari kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (bahasa Prancis). Kata *Staat*, *state*, *etat* itu diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan).⁷

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat,⁸ yang bercita-cita menegakkan hak dan keadilan bagi segenap rakyat, serta berusaha untuk memudahkan jalan mencari penghidupan dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian.⁹

Islam datang memperbaiki akidah dengan memastikan keesaan Allah dalam arti seluas kata, dan memperbaiki kerusakan masyarakat dengan menghapus segala bentuk perbedaan derajat manusia; maka atas dasar dan tujuan inilah, Islam membangun negara.¹⁰

Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk bidang politik. Dari sudut pandang ini, maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*dawlah*). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah negara kota (*city-*

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 65.

⁷ Dede Rosyada et al, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), 41.

⁸ *Ibid.*, 42.

⁹ Mushthafa As-Siba'i, *Agama dan Negara Studi Perbandingan antara Yahudi-Kristen-Islam*, (Surabaya: Asia Afrika, 1978), 4.

¹⁰ A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 50.

state). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.¹¹

Tujuan utama dari sebuah pemerintahan Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam. Oleh karena itu, sebuah masyarakat Islam, secara definif adalah sebuah masyarakat yang ideal di mana tertib sosial telah dibentuk dan diatur sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran, dan aturan-aturannya.¹² Kepemimpinan dalam Islam atau *imâmah* adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.¹³

Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan paham akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.¹⁴

Di Indonesia, banyak tokoh muslim yang berkontribusi dalam pemikiran hubungan antara Islam dan negara, di antaranya adalah KH. Ahmad Siddiq.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan membahas tentang pandangan KH. Ahmad Siddiq tentang Islam dan negara.

Biografi KH. Achmad Siddiq

K.H. Achmad Siddiq, yang mempunyai nama kecil Achmad Muhammad Hasan, lahir di Jember pada hari Ahad legi, 24 Januari 1926 (10 Rajab 1344), atau tujuh hari sebelum kelahiran *Jam' iyyah*

¹¹ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan*, 61.

¹² Ahmad Vaezi, *Agama Politik*, diterjemahkan oleh Ali Syahab, (Jakarta: Citra, 2006), 10

¹³ A. Dzjazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 87.

¹⁴ Dede Rosyada *et al*, *Pendidikan Kewargaan*, 64.

¹⁵ Greg Barton, *Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, diterjemahkan oleh Lie Hua, (Yogyakarta: LKiS, 2002), 153.

Nahdlatul Ulama, dan meninggal dunia pada hari Rabu, 23 Januari 1991 (7 Rajab 1411) di Surabaya. Achmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq dari isteri keduanya, Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam binti K.H. Yusuf). Achmad Siddiq merupakan putra ke-25 sekaligus anak bungsu dari pendiri Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra (astra),¹⁶ dari Nyai Zakiah yang lebih dikenal dengan Nyai Maryam.¹⁷

Ketika berusia dua tahun, KH. Achmad Siddiq sudah ditinggal ibunya yang wafat di laut merah dalam perjalanan pulang haji dari tanah suci, Makkah. Tujuh tahun kemudian, ayahnya tutup usia ketika Achmad Siddiq belum genap berusia sepuluh tahun. Sejak itu, kakaknya, Mahfudz Siddiq mendapat tugas untuk membesarkan Achmad Siddiq. Dari pengasuhan inilah, Achmad Siddiq banyak mewarisi sifat dan karakter sang kakak. Kiai Achmad Siddiq memiliki watak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Wawasan berpikirnya amat luas, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum.¹⁸

Perjalanan hidup Kiai Achmad dimulai dari bawah, ia pernah menjual baju-baju di pasar, dan hasil usahanya hanya bisa digunakan untuk membeli rokok. Kehidupannya yang sederhana dan memprihatinkan tidak lantas menghalanginya untuk menikah. Pada tanggal 23 Juni 1947, ia mempersunting seorang gadis bernama sholihah, asal desa Mangunsari, Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal perkawinannya, Kiai Achmad Siddiq masih merasakan masa-masa yang sulit. Namun, perlahan tapi pasti, nasibnya mulai membaik ketika ia menjadi penulis pribadi gurunya, KH, Wahid Hasyim yang menjabat Menteri Agama.

Memasuki tahun ke-8, perkawinannya dirundung kesedihan dengan wafatnya isteri tercinta pada tahun 1955. Segera setelah itu, pada tahun yang sama, ia pun menikahi Hj. Nihayah, adik

¹⁶ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf*, (Surabaya: Erlangga, tt), 13.

¹⁷ *Ibid.*, 14.

¹⁸ *Ibid.*, 15.

ketiga dari almarhumah isterinya. Dengan Isteri pertamanya, Nyai Sholihah binti K.H. Abdul Mujib, Kiai Achmad Siddiq dikarunia lima orang anak, dan delapan anak dari Nyai Hj. Nihayah.¹⁹

Menurut silsilah, Achmad Siddiq adalah keturunan ke-15 dari Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Islam di Pajang. Secara lengkap dapat disebutkan, Achmad Siddiq putra Kiai Muhammad Siddiq putra Kiai Abdullah (Lasem) putra Kiai Muhammad Shaleh Tirtowijoyo putra Kiai Asy'ari putra Kiai Adra'i putra Kiai Muhammad Yusuf putra Mbah Sambu putra Raden Sumonegro putra Raden Pringgokusumo (Adipati Lasem III) putra Joyonegoro putra Pangeran Joyokusumo putra Hadijoyo putra Pangeran Benowo II, putra Pangeran Benowo I putra Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir alias Mas Karebet. Dari garis Mbah Sambu itu silsilah KH. Achmad Siddiq bertemu dengan KH. Hasyim Asy'ari.²⁰

Dalam menempuh studi, Kiai Achmad Siddiq tidak belajar kepada satu guru atau kiai saja. sedikitnya ada lima orang yang banyak memengaruhi jalan hidup Kiai Achmad Siddiq, baik dalam pemikiran maupun sepak terjangnya. Kelima orang tersebut adalah KH. Muhammad Siddiq, ayahandanya sendiri; KH. Hasyim Asy'ari, Pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebuireng. A. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Siddiq, kakaknya sendiri yang pernah menjabat ketua PBNU di zaman Jepang, dan KH. Abdul Hamid Pasuruan. Orang yang disebut terakhir ini malah dianggap sangat berperan besar dalam membentuk perilaku tasawufnya. Bahkan, Kiai Achmad pernah menuturkan bahwa KH. Abdul Hamid Pasuruan adalah pengayom dan pembimbingnya di bidang spriritual.²¹

Sementara itu tokoh lain yang tidak dipublikasikan tetapi cukup berpengaruh ialah KH. Hamim Djazuli (Gus Miek) yang

¹⁹ Ibid., 16.

²⁰ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: LTN-Nu, 1995), 142.

²¹ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf*, 17.

dikenal sebagai tokoh kontroversial, seorang tokoh seaman al-Qur'an, dan putra KH. Djazuli Utsman Ploso Kediri; serta Ir. Soekarno, Presiden pertama RI. Namun tokoh yang amat ia idolakan ialah nabi Muhammad saw.²²

Selain berguru kepada ayahanda dan kakaknya, Kiai Achmad Siddiq mulai memasuki Tebuireng, setelah belajar pada Sekolah Rakyat Islam dan Belajar agama dengan ayahnya di Jember. Ia belajar kitab-kitab agama pada KH. Hasyim Asy'ari yang antara lain; *Tuhfatul Athfâl*, *Fathul Qarîb* (pada tingkat dasar), *Tahrîr*, *Fathul Mu'în* (Fiqih), *Alfiyah ibn Mâlik* (Ilmu Bahasa Arab), *Arûdl wa Qawâfiy* (sastra), *Jawâhir al-Kalâmiyyah* (teologi), *Waraqât* (Usul Fiqih), Ilmu Falak, *Mizân al-Qawîm*, *Uqûdul Juman* (sastra), serta *Tafsîr al-Baidlâwi* dan *Ihyâ Ulûmuddîn*.²³

Achmad Siddiq juga masuk ke dalam madrasah Nidhamiyahnya KH. Wahid Hasyim. Bahkan Achmad Siddiq memperoleh kesempatan menjadi 'kelompok intelektual santri' yang secara khusus dikader oleh KH. Wahid Hasyim. Dalam kelompok terbatas itulah, KH. Wahid Hasyim selalu mendiskusikan perkembangan politik nasional.²⁴ Berkat kecerdasan, kesahajaan, dan kemampuan Kiai Achmad Siddiq di bidang menulis dan berpidato, tumbuhlah kedekatannya dengan KH. A. Wahid Hasyim. Perhatian Gus Wahid sangat besar kepadanya, mulai dari urusan belajar sampai menyusun sebuah konsep kegiatan atau keilmuan. Bahkan, Kiai Achmad Siddiq masuk barisan depan daftar "antrian didikan khusus Gus Wahid, membawahi Saifuddin Zuhri dan Idham Chalid. Sebagai santri garda depan, ia pun diangkat menjadi pengajar pesantren, kader utama, dan selanjutnya menjadi sekretaris pribadi KH. A. Wahid Hasyim.²⁵

Di Tebuireng, Kiai Achmad berkawan dengan Kiai A. Muchith Muzadi. Bahkan menurut penuturan Kiai A. Muchit

²² Ibid., 18.

²³ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 145.

²⁴ Ibid., 146.

²⁵ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf*, 20.

Muzadi, Kiai Achmad pernah satu kamar dengannya. Kiai Muchith Muzadi yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kiai Achmad Siddiq mengakui kecerdasan Kiai Achmad.

Karir dan perjuangan K.H. Achmad Siddiq dimulai pada tahun 1945 ketika ia berusia 19 tahun, Achmad Siddiq menjadi kordinator GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) untuk daerah Jember dan Besuki. Aktivasnya di organisasi kepemudaan yang berafiliasi pada Masyumi, tampaknya membuat hubungannya dengan KH. A. Wahid Hasyim tak pernah putus.²⁶ Karirnya di GPII menanjak dan mengantarkan dirinya menjadi pengurus tingkat provinsi Jawa Timur. Pada Pemilu 1955 ia terpilih sebagai anggota DPR Daerah Sementara Jember. Perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI juga tak bisa dinafikan, khususnya perjuangan bersama Laskar Mujahidin/PPPR (Pusat Pimpinan Perjuangan Rakyat) pada tahun 1947.²⁷

Pengabdian Kiai Achmad di pemerintahan berawal dari posisi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian meningkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur sampai tahun 1971. Pada tahun 1955-1957 dan 1971 Kiai Achmad menjadi anggota DPR RI.²⁸

Di lingkungan NU, karir Kiai Achmad dimulai dari Jember. Tidak lama setelah itu, ia aktif di NU tingkat wilayah Jawa Timur, hingga terpilih ketua umum tingkat wilayah. Karirnya terus berkembang hingga pada Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur yang mengantarkannya ke kursi Ra'is 'Am PBNU periode 1984-1989. Terangkatnya Kiai Achmad sebagai Ra'is 'Am PBNU waktu itu bukan tanpa alasan. Kiai Achmad sudah lama dilirik oleh para tokoh NU, dikarenakan kepiawaian, kepandaian, dan kecerdasannya.²⁹

²⁶ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 146.

²⁷ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq*, 22.

²⁸ *Ibid.*, 23.

²⁹ *Ibid.*, 23.

Pemilu tahun 1977, ia pun kembali menjadi anggota DPR dan sejak itu pula ia kembali ke kota kelahirannya, Jember, untuk memimpin Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra hingga tahun 1991. Pada tahun 1911 Kiai Achmad mulai mengajarkan dan mengembangkan pemikiran tasawufnya secara intens melalui ceramah, pengajian, serta gerakan ritual yang terhimpun dalam jamaah wirid *Dzikir al-Ghâfilîn*. Melalui *Awrâd Dzikir al-Ghâfilîn*, ia berikhtiar untuk menciptakan suasana dan iklim religius guna membentengi masyarakat dalam menghadapi arus global modernitas. Modernitas, bagi Kiai Achmad dipandang sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan dampak negatif (mudarat) daripada positif. Selain membimbing jamaah *Dzikir al-Ghâfilîn*, Kiai Achmad juga mendidik santri-santrinya melalui pengajian kitab kuning, seperti *Tafsîr al-Jalâlain*, *Riyâdh al-Shâlihîn*, *Hadîs Shahîh Muslim*, *Risâlat al-Mu'awanah*, *Fath al-Qarîb al-Mujîb (Taqrîb)*, *Kifâyat al-Akhyâr*, *al-Adzkâr*, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, *al-Dîn al-Islâm*, dan sebagainya.³⁰

Menjelang Mukhtar NU ke-28, kesehatan Kiai Achmad terus memburuk. Ia mengidap sederet penyakit kronis yang menderanya sejak tahun 1982; kencing manis, jantung, ginjal, hati, saraf, dan oestoporosis (tulang keropos). Anehnya, dalam kondisi yang kritis, warga NU tetap menginginkannya untuk memangku jabatan Ra'is 'Am. Kiai Achmad jatuh sakit ketika menghadiri Munas Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tahun 1990. Pada tanggal 23 Januari 1991, Kiai Achmad mengembuskan nafas terakhir dan dimakamkan di pemakaman orang-orang penghafal al-Qur'an di kompleks Pesantren Ploso, Mojo Kediri.³¹

Pandangan KH. Achmad Siddiq tentang Islam dan Negara

Di antara pandangan KH. Achmad Siddiq tentang Islam dan negara adalah relasi Islam dengan Pancasila, Islam dan NKRI,

³⁰ Ibid., 24.

³¹ Ibid., 26.

ukhuwwah dan negara, hak politik warga Nahdlatul Ulama, dan etika politik di Indonesia:³²

1. Relasi Islam dan Pancasila

Tentang kedudukan Pancasila di hadapan Islam, Kiai Achmad Siddiq menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Ideologi, pada umumnya diartikan berkaitan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasaran, dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara berlebih-lebihan menganggap bahwa "ideologi adalah agama." Padahal biar bagaimanapun hebatnya ideologi ia tetap hasil pemikiran manusia tidak akan sampai ke derajat agama.³³ Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, berbudaya, berdasar negara dan sebagainya, asal ideologi dan sebagainya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan dapat menempatkan agama dan ideologinya (yang tidak bertentangan dengan agamanya) pada tempatnya masing-masing secara tepat.³⁴

Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling menguatkan. Keduanya dapat bersama-sama dilaksanakan dan diamalkan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Karena itu, sangat tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan.³⁵ Banyak faktor yang merupakan modal dasar bagi upaya proporsionalisasi Pancasila dan agama, khususnya Islam, antara lain:

- a. Sama-sama berwatak akomodatif.
- b. Subtansi (*mâhiyah*) masing-masing sejalan.

³² Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 168.

³³ *Ibid.*, 173.

³⁴ Choirul Anam, *Pemikiran KH. Achmad Siddiq*, (Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 1992), 124.

³⁵ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 174.

c. Bangsa Indonesia adalah bangsa beragama.³⁶

Diakui masih ada hambatan bagi proporsionalisasi itu, terutama berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran dari dua arah. Dari satu arah, ada kecurigaan dan kekhawatiran bahwa negara Republik Indonesia akan menjadi negara agama tertentu yang merugikan pemeluk agama lain. Dari arah lain, terdapat kecurigaan dan kekhawatiran bahwa Pancasila akan dijadikan semacam agama nasional yang menggantikan atau paling tidak mendangkalkan jiwa agama-agama.³⁷

Umat Islam menerima Pancasila, bukan sekedar taktik melainkan ada tiga pertimbangan: *Pertama*, umat Islam Indonesia (melalui para pemimpinnya) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (Piagam Jakarta), yang diterima dan disahkan dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. *Kedua*, secara substansial nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan Islam. misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islam (al-Qur'an surah al-Ikhlâs), demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu, maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama (khususnya Islam). Bahkan urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka '*âmanû wa amilû al-shâlihât.*' Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan '*âmanû*, maka kiranya tidak terlalu keliru kalau empat sila berikutnya dapat mencerminkan '*amilû al-shâlihât.*' *Ketiga*, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya negara Pancasila, agama terhayati dan teramalkan

³⁶ Choirul Anam, *Pemikiran KH. Achmad*, 124.

³⁷ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 174.

secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan dalam pembinaan hukum nasional.³⁸

2. Islam dan NKRI

Di dalam wadah negara Republik Indonesia dan di tengah-tengah masyarakat Indonesia itulah, kita ber-amar ma'ruf dan ber-nahi munkar, mengusahakan terwujudnya *khaira ummah*.³⁹

Negara sebagai salah satu wujud persekutuan sosial plus kekuasaan di dalamnya, juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan tata kehidupan yang diridhoi oleh Allah swt. Yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa perjuangan da'wah *ilâ* Allah ini harus dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah pula, guna menuju *rahmatan li al-'âlamîn*.⁴⁰

Negara Republik Indonesia lahir dan tegak berdiri sebagai hasil perjuangan seluruh golongan rakyat Indonesia dengan penuh pengorbanan harta, air mata dan jiwa para pahlawan dan syuhada. Atas dasar kesepakatan para pembentuk negara bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1954. Pancasila itu merupakan lima gagasan dasar atau serangkaian lima asas bernegara di Indonesia. Bernegara adalah kebijaksanaan untuk mengorganisasikan masyarakat negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴¹

³⁸ Ibid., 175.

³⁹ Ibid., 109.

⁴⁰ Ibid., 117.

⁴¹ Ibid., 112.

Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan dalam pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.⁴²

Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara berdasarkan atas suatu agama tertentu. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama (khususnya nilai-nilai luhur Dinul Islam) benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan taqwanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.⁴³

3. Ukhuwah dan Negara

Masalah yang merisaukan bangsa Indonesia adalah belum terintegrasinya secara tuntas antara perbedaan agama dan etnis dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. KH. Achmad Siddiq sebagai satu ulama brilian yang dimiliki Nahdlatul Ulama mencoba memberikan solusi dalam pola hubungan masyarakat Indonesia yang majemuk ini dengan konsep yang diambil dari ajaran Islam, yang dikenal dengan tri ukhuwahnya; *ukhuwwah Islâmiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, dan *ukhuwwah Insâniyyah (basyariyyah)*.⁴⁴ Konsep tri ukhuwah ini adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip *at-tawassuth*, *al-i'tidâl*, dan *at-tawâzun* dalam bidang *mu'âsyarah* (pergaulan antar golongan).⁴⁵ Kunci pertama bagi tumbuh dan berkembangnya *ukhuwwah al-Islâmiyyah* adalah kesamaan wawasan, terutama dalam beberapa hal pokok, tanpa mengesampingkan perbedaan mengenai hal-hal yang tidak pokok.

⁴² Ibid., 113.

⁴³ Ibid., 113.

⁴⁴ Rudy Al Hana, "Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah", dalam *Study Islam*, vol IV, Agustus, 2004), 2.

⁴⁵ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq*, 88.

Ukhuwwah al-Islâmiyyah yang berkembang sehat di Indonesia bukan saja akan bermanfaat bagi kaum muslimin Indonesia sendiri, tetapi juga sangat bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia serta kaum muslimin di seluruh dunia.⁴⁶

Konsep *ukhuwwah* yang dikembangkan Kiai Achmad Siddiq adalah sebagai berikut:

- a. *Ukhuwwah Islâmiyyah*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. *Ukhuwwah wathaniyyah*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme.
- c. *Ukhuwwah Insâniyyah (basyariyyah)*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.⁴⁷

Ukhuwwah Islâmiyyah sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dengan sesama muslim. Dengan semangat ini perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menyebabkan perpecahan. Yang diperlukan bagi terciptanya *ukhuwwah Islâmiyyah* ini adalah pengembangan saling pengertian, saling menghormati dan tidak mengklaim kebenaran sendiri, agar jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia dapat saling mengisi.

Ukhuwwah wathaniyyah, sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa Indonesia. Islam mengakui adanya kelompok-kelompok manusia, bangsa, kabilah dan perbedaan agama. Orang tidak perlu dibedakan hanya karena adanya perbedaan agama dan keyakinan. Seperti terbukti dalam proses pembentukan bangsa Indonesia, umat Islam bersama-sama dengan kelompok lain berproses dalam pembentukan bangsa itu.⁴⁸

Dua macam *ukhuwwah* yang disebut lebih dulu (*ukhuwwah Islâmiyyah* dan *wathaniyyah*) merupakan landasan bagi

⁴⁶ PBNU, *Wawancara dengan Rais Am PBNU, KH. Achmad Siddiq*, (Jakarta: Lajnah Ta'lif Wa Nasyar PBNU 1985), 15.

⁴⁷ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad*, 88.

⁴⁸ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 177.

terwujudnya *ukhuwwah Insâniyyah (basyariyyah)*. Kedua *ukhuwwah* itu harus dijalankan bersama-sama dan serentak karena keduanya saling mendukung dan saling membutuhkan, tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain.⁴⁹

4. Hak politik warga Nahdlatul Ulama

Hak berpolitik adalah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama bukanlah wadah kegiatan berpolitik praktis. Penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, mengikuti kaidah agama dan moral yang luhur, sehingga tercipta budaya politik yang sehat.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bersungguh-sungguh dan memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik yang manapun dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik pilihan itu, selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan umat Islam.⁵⁰

Ada dua hal tentang "politik" yang harus dibedakan, karena memang berbeda jauh. Pertama: Budaya politik, kedua: Politik praktis. Perbedaannya sebagai berikut:

- a. Budaya politik ialah sikap dan tingkah laku yang sudah mapan di dalam melakukan perbuatan politik. Mungkin budaya politik itu masih rendah, kotor, curang dan mungkin sudah luhur, jujur bertanggung jawab dan bermoral. Dengan tegas, NU menginginkan terwujudnya budaya politik yang sehat dan berakhlak. NU akan bertindak terhadap warganya seseorang warganya yang melakukan perbuatan politik secara melanggar agama, sebagaimana mungkin NU bertindak terhadap warganya yang menjadi karyawan yang melakukan korupsi, penipuan dan sebagainya.⁵¹

⁴⁹ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of KH. Achmad*, 88.

⁵⁰ *Ibid.*, 69.

⁵¹ *Ibid.*, 92.

- b. Politik praktis ialah perbuatan politik yang langsung menuju sasaran untuk mendapatkan kekuasaan atau bagian kekuasaan melalui kursi-kursi perwakilan. Dalam hal ini, tegas NU secara organisatoris tidak lagi turut campur. Penggunaan hak politik warga negara yang diberikan oleh undang-undang, terserah sepenuhnya kepada masing-masing pribadi warga NU, dengan pesan wanti-wanti: pergunakanlah hak itu secara bertanggungjawab, sesuai dengan budaya politik yang sehat.⁵²

Sebagai organisasi, NU tidak mau terikat lagi dengan salah satu organisasi politik yang manapun. NU tidak lagi terlibat di urusan "politik praktis". Sebagaimana warga NU boleh masuk atau tidak masuk klub olahraga manapun.⁵³ Tetapi, ketika warga NU dalam memasuki sesuatu Orpol, warga NU tidak perlu minta restu atau dukungan dari NU, dan "ngaku-ngaku" mendapat restu dari NU untuk mendapat barakahnya NU. Demikian juga, kalau "disana", menghadapi kesulitan, jangan merengek-rengok supaya NU turun tangan.

Untuk mencegah supaya NU tidak terbawa-bawa di dalam arena rebutan pengaruh, dan supaya tugas serta kewenangan sebagai pengurus inti NU tidak berbaur dengan tugas/kewenangan sebagai pengurus Orpol (yang manapun), maka diadakanlah larangan perangkapan jabatan. Pengurus inti NU tidak boleh merangkap menjadi pengurus inti sesuatu parpol. Warga NU yang bukan pengurus inti NU boleh menjadi pengurus inti sesuatu parpol. Warga NU yang menjadi anggota/pengurus Orpol manapun masih tetap warga NU selama masih menunjukkan kesetiannya kepada NU.⁵⁴

5. Etika Politik dalam Kehidupan Bangsa

Etika politik *Ahlusunnah Wal Jamâ'ah* adalah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai langkah pembinaan *khaira ummah* dalam masyarakat Pancasila. Kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar

⁵² Ibid., 93.

⁵³ Ibid., 91.

⁵⁴ Ibid., 92.

bagi Nahdlatul Ulama sebagai alat perjuangan Islam. Nahdlatul Ulama sejak semula sudah menetapkan bagi dirinya sendiri, memilih sebagian “pembinaan masyarakat” (*society building*).⁵⁵ Akan tetapi umat terbaik tentu harus memiliki sifat-sifat yang baik itu disebut satu persatu, secara terperinci. Yang dapat disebut, hanyalah garis-garis besar dari kumpulan sifat-sifat yang baik tersebut.⁵⁶

Menemukan garis besar dari sifat-sifat *khaira ummah*, yaitu: taqwa yang penuh utuh dan mantab, (penuh, utuh: *haqqa tuqâtihi*, mantap, tak tergoyahkan, terbawa sampai mati), berpegang teguh kepada ajaran-ajaran (Agama) Allah, tidak menempuh jalan simpangan, bersatu padu, dengan ikatan aqidah, melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar.⁵⁷

Pada tahun 1935-an, Nahdlatul Ulama sudah pernah melancarkan “gerakan” yang disebut “*mabâdi’ khaira ummah*” yang berisi, *al-shidq* (kebenaran, kejujuran), *al-Wafâ bi al-’ahd* (menepati janji), *at-ta’âwan* (tolong menolong). Gerakan *mabâdi’ khaira ummah* ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama pada zaman itu sudah mempunyai program kerja yang sistematis. Mungkin lebih sistematis dari pada Nahdlatul Ulama zaman modern.⁵⁸

Dari uraian tersebut, menjadi jelas adanya hubungan timbal balik antara *khaira ummah* dengan amar ma’ruf dan nahi munkar. Umat yang “*khaira ummah*” adalah umat yang melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, di samping sifat-sifat yang lain, dengan amar ma’ruf dan nahi munkar yang dilakukan secara benar, teratur dan terarah akan terwujud *khaira ummah*.⁵⁹ NU berpesan: di mana pun anda berpolitik praktis, buatlah secara bertanggung jawab dan berakhlaklah dengan *al-akhlâq al-karîmah*.⁶⁰

⁵⁵ Ibid., 96.

⁵⁶ Ibid., 101.

⁵⁷ Ibid., 103.

⁵⁸ Ibid., 104.

⁵⁹ Ibid., 105.

⁶⁰ Ibid., 92.

Analisis terhadap Pemikiran KH. Ahmad Siddiq tentang Islam dan Negara

Terdapat tiga teori hubungan politik dan agama di dalam Islam, antara lain; yang pertama dimaknai sebagai hubungan antara agama dan negara yang tak terpisahkan (*integrated*), seperti yang dikonsepsikan oleh para pemikir madzab Syi'ah, dan juga oleh al-Maududi, al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha. Dalam pandangan para tokoh ini, wilayah agama dan negara tidak dapat dipisahkan; wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Oleh karena itu, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Tuhan (*divine sovereignty*) karena kedaulatan itu memang berasal dari dan berada di tangan Tuhan. Pandangan inilah yang juga disebut sebagai fundamentalisme Islam.⁶¹

Kedua, pemikiran politik yang mengandung hubungan agama dan negara bersifat simbiotik, yaitu berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, negara membutuhkan agama sebagai dasar pijak kekuatan moral sehingga ia dapat menjadi mekanisme kontrol; sementara di sisi lain agama memerlukan negara sebagai sarana untuk pengembangan agama itu sendiri.⁶²

Ketiga, pemikiran politik yang memandang hubungan agama dan negara bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak hubungan yang bersifat simbiotik maupun *integrated*.⁶³

Di antara ketiga pemikiran di atas, pemikiran KH. Ahmad Siddiq termasuk dalam kategori kelompok kedua yang menyatakan bahwa hubungan agama dan negara bersifat simbiotik. Hal tersebut secara nyata, terlihat dari pemikirannya tentang konsep *ukhuwwah* dalam bernegara, yaitu ada tiga

⁶¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 24

⁶² *Ibid.*, 25.

⁶³ *Ibid.*, 26.

ukhuwwah: *ukhuwwah Islâmiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, dan *ukhuwwah insâniyyah*. Dengan konsep *ukhuwwah* tersebut, maka hubungan agama dan negara saling melengkapi satu sama lain.

Mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia, secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan paham akomodatif lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.⁶⁴

Dalam konteks ke Indonesian, Adnan berpendapat, hubungan agama dan negara dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kelompok akomodatif. Kelompok ini dipelopori oleh Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid berpandangan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama dan kehidupan duniawi di atur oleh logika duniawi. Pemikiran ini mengandung elemen "sekularistik", yaitu adanya upaya memisahkan antara agama dengan dunia, meskipun yang sebenarnya hanyalah pembedaan wilayah: ada wilayah yang semata-mata urusan agama dan ada wilayah yang semata-mata duniawi. Pemikiran seperti ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari "Islam politik" ke "Islam kultural." Sebagai akibatnya, Islam lebih berwatak liberalis dan humanis yang menawarkan kebebasan dan kemanusiaan bagi penganutnya, daripada watak politis yang menakutkan, utamanya bagi penyelenggara negara. Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), pemikiran akomodatif dapat dilihat pada diri Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sukses menarik gerbong NU ke khittah 1926 dan berhasil memisahkan NU dari politik praktis. Dengan demikian, tidak ada lagi politik Islam dan juga tidak ada lembaga

⁶⁴ Dede Rosyada et al, *Pendidikan Kewargaan*, 64.

politik Islam, atau dengan kata lain, ia mengasingkan pentingnya eksistensi lembaga politik Islam.⁶⁵

Kedua, kelompok moderat, dengan tokoh Amien Rais, Jalaluddin Rahmat, dan Imaduddin Abdurrahim. Kelompok ini berpendirian bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologis. Islam ialah agama totalistik (*kaffah*) yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kehidupan sosial politik.

Ketiga, kelompok idealis-radikal. Kelompok ini beranggapan bahwa Islam berada di atas semua ideologi sehingga untuk memperjuangkannya diperlukan cara-cara kekerasan dan sekaligus menolak ideologi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan organisasi sosial kemasyarakatan dan agama harus menjadi ideologi menggantikan Pancasila. Pandangan ini dapat di lihat pada visi dan misi Abdul Qadir Jaelani.⁶⁶

Berdasarkan teori hubungan agama dan negara dalam konteks keindonesiaan di atas, pemikiran KH. Ahmad Siddiq termasuk dalam kategori pertama, yaitu kelompok akomodatif. Dalam hubungan agama dan negara di Indonesia, beliau menerima Pancasila sebagai bagian dari konsep tauhid (keimanan) dan amal shaleh, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan agama tidak bertentangan dengan Pancasila.

Penutup

Pemikiran K.H. Achmad Siddiq berusaha mengaktualisasikan Islam dan ke-Indonesia-an dalam format ajaran *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dalam bentuk simbiosis mutualistik berupa: (1) Memaknai Pancasila dengan konsep Tauhid yang berbasis humanis, (2) Membangun konsep Pluralistik yakni, konsep trilogi ukhuwwahnya. Yaitu, *ukhuwwah Islâmiyyah*, *ukhuwwah wathaniyyah*, *ukhuwwah basyariyyah*, (3) Mewujudkan Islam *rahmatan li al-'âlamîn* dengan bingkai negara Indonesia berbentuk

⁶⁵ Ibid., 27.

⁶⁶ Ibid., 28.

NKRI yang final dalam usaha merealisasikan *al-mashlahah al-âmmah*.

Negara dan agama sejatinya ada korelasinya. Agama mengatur nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai kehidupan di mana agama berperan dalam membentuk nilai-nilai etik, sedangkan negara bertugas mengaktualisasikan nilai-nilai etik dan moral dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga agama dan negara saling menguatkan fungsi masing-masing.

Daftar Pustaka

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hasjmy, A. *Di mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Silahun, Abdul Raup. *Membela Islam*. Bandung: MQ Publishing, 2006.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Vaezi, Ahmad. *Agama Politik*. diterjemahkan oleh Ali Syahab, Jakarta: Citra, 2006.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Anam, Choirul. *Pemikiran KH. Achmad Siddiq*. Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, 1992.
- Rosyada, Dede. *et.al. Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Barton, Greg. *Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. diterjemahkan oleh Lie Hua, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: LTN-Nu, 1995.

- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- As-Siba'i, Mushthafa. *Agama dan Negara Studi Perbandingan antara Yahudi-Kristen-Islam*. Surabaya: Asia Afrika, 1978.
- PBNU. *Wawancara dengan Rais Aam PBNU, KH. Achmad Siddiq*. Jakarta: Lajnah Ta'lif Wa Nasyar PBNU 1985.
- Al Hana, Rudy. "Pemikiran KH. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah", dalam *Study Islam*. vol IV, Agustus, 2004.
- Ni'am, Syamsun. *The Wisdom of KH. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf*. Surabaya: Erlangga, tt.
- Syaltut, Syeikh Mahmud. *Akidah dan Syariah Islam 1*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.